**ANGGARAN DASAR
YAYASAN IKHWANUL JANNAH**

الْإِخْوَانُ الْجَنَانَةُ

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Yayasan Ikhwanul Jannah

Pasal 2
Waktu, Tempat dan Kedudukan

Yayasan Ikhwanul Jannah didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2018 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di “Masjid Jami’ Nurul Jannah, Gg. Gaya RT 007/01, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Madya Jakarta Selatan”

BAB II
AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3
Azas

Yayasan Ikhwanul Jannah berazaskan Islam dan Pancasila

Pasal 4
Landasan

Yayasan Ikhwanul Jannah berlandaskan Al-Quran, Assunah, Pancasila dan UUD 1945

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- a. Sosial
- b. Keagamaan, dan
- c. Kemanusiaan

BAB IV KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), yayasan mempunyai kegiatan dan usaha :

- a. Sosial : - Mendirikan lembaga non formal
 - Mengelola Panti asuhan, Panti jompo dan panti wreda
 - Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium
 - Pembinaan di bidang olah raga
 - Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan
 - Studi banding
 - Menyelenggarakan pendidikan umum

- b. Keagamaan : - Mendirikan sarana ibadah
 - Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sadaqoh
 - Meningkatkan pemahaman keagamaan
 - Melaksanakan syiar keagamaan
 - Studi banding keagamaan

- c. Kemanusiaan : - Memberi bantuan korban bencana alam
 - Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
 - Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan
 - Memberikan perlindungan konsumen
 - Melestarikan lingkungan hidup

BAB V KEKAYAAN

Pasal 7

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal uang berasal dari kekayaan pendiri dan pengelola yayasan.
2. Selain itu dapat juga diperoleh dari :
 - a. Dana-dana yang terhimpun dari sadaqah, wakaf dan sumbangan lain dari kalangan masyarakat.
 - b. Penghasilan dari kegiatan yayasan.
 - c. Bantuan dari yayasan dan/atau badan lain, baik dalam maupun luar negeri yang halal, sah, dan tidak mengikat.

3. Segala kekayaan Yayasan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta kekayaan tak berwujud lainnya, dikelola oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus.

BAB V LAMBANG

Pasal 8

Yayasan berlambangkan sebuah siluet masjid dengan lambang matahari bersinar 8 dipuncaknya dan 6 buah bintang berwarna merah. Kubah berwarna hitam dengan inisial IJ serta tulisan Ikhwanul Jannah berbahasa arab dengan khat khoufi dan 5 ornamen berwarna hijau. Di sisi sebelah kanan logo terdapat tulisan latin Yayasan Ikhwanul Jannah berwarna hitam.

BAB VI KEKUASAAN DAN ORGAN YAYASAN

Pasal 9 Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi Yayasan ada pada musyawarah.

Pasal 10 Organ Yayasan

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :
 - a. Pembina
 - b. Pengurus
 - c. Pengawas
 - d. Pelaksana Kegiatan
2. Pembentukan divisi serta staf dibentuk menyesuaikan dengan kebutuhan yayasan.

Pasal 11

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada pengurus dan/atau pengawas.
2. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.
3. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan.

Pasal 12

Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang/perseorangan dari Dewan Pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 13

1. Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang/perseorangan yang mampu menjalankan organisasi dan taat kepada AD/ART yayasan.
2. Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 14

Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB VII RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

Rapat

Rapat-rapat yayasan terdiri dari :

- a. Rapat Pembina adalah rapat yang dilaksanakan Dewan Pembina dan hanya diikuti oleh anggota Pembina dalam rangka kewenangannya.
- b. Rapat Pengurus adalah rapat yang dilaksanakan Pengurus dalam rangka melaksanakan kewenangan dan kewajibannya.
- c. Rapat Pengawas adalah rapat yang dilaksanakan Pengawas dan hanya diikuti oleh anggota Pengawas dalam rangka melaksanakan kewenangan dan kewajibannya.
- d. Rapat gabungan adalah rapat yang dilaksanakan oleh beberapa organ yayasan.

Pasal 16

Pengambilan Keputusan

1. Rapat yayasan dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ lebih satu dari jumlah undangan yang seharusnya, kecuali Rapat Pembina dan Rapat Pengawas.

2. Rapat Pembina dan Rapat Pengawas dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota.
3. Rapat Gabungan dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari masing-masing organ Yayasan yang berhak menghadirinya.

Pasal 17

1. Apabila jumlah undangan rapat yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, maka setelah ditunda 1 (satu) jam maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan kuorum.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk Rapat Pembina dan/atau Rapat Pengawas.
3. Apabila dalam Rapat Pembina dan Rapat Pengawas jumlah undangan rapat yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, maka rapat ditunda untuk memberikan undangan ulang.
4. Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) peserta rapat masih belum memenuhi syarat minimal kehadiran, maka setelah ditunda 1 (satu) jam rapat dapat dilaksanakan dan keputusan dianggap sah.

Pasal 18

1. Keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir dan hanya dilakukan terhadap pendapat-pendapat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

1. Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatan Yayasan selama 1 (satu) tahun kepada Pembina.
2. Pengurus menyusun ikhtisar laporan keuangan untuk diumumkan kepada masyarakat terutama para donatur.
3. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan dan hanya bisa dilaksanakan dalam Rapat Gabungan.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 21

1. Yayasan dapat dibubarkan melalui :
 - a. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Rapat Pembina dan/atau Rapat Gabungan yang dilaksanakan khusus untuk maksud tersebut.
2. Rapat Pembina dan/atau rapat Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dianggap sah apabila dihadiri oleh seluruh Pembina.

BAB XI PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka akan diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN IKHWANUL JANNAH**

الْإِخْوَانُ الْجَنَّةُ

BAB I PENJABARAN LAMBANG

Pasal 1

- a. Lambang Yayasan sebagaimana yang tersebut dalam Anggaran Dasar dengan penjelasan dan falsafah sebagai berikut
- b. Matahari dengan 8 sinar melambangkan simbol kesetiaan, cinta, kekuatan serta keikhlasan yang menjadi awal dari semangat yang baru. 8 sinar berwarna merah melambangkan keberanian dari 8 pendiri untuk memberikan energi yang baru pada lembaga.
- c. 6 bintang melambangkan rukun Iman
- d. Inisial huruf Ikhwanul Jannah (IJ) membentuk siluet masjid yang merupakan pusat dari seluruh kegiatan.
- e. Tulisan Ikhwanul Jannah berbahasa arab dengan menggunakan khat khoufi berwarna hijau, dimana khat khoufi merupakan bentuk kaligrafi tertua yang pernah ada dan masih sering digunakan sampai sekarang dengan harapan yayasan akan tetap bermanfaat selamanya.
- f. 5 ornamen didalam kaligrafi menggambarkan rukun Islam.

BAB II PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ORGAN YAYASAN

Pasal 2

Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pembina

1. Pengangkatan anggota Pembina dari luar unsur pendiri dilakukan dalam rapat Pembina dengan mempertimbangkan usulan dari Pengurus.
2. Apabila Yayasan karena suatu sebab tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, maka Pengurus dan Pengawas mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar pasal 12.
3. Pimpinan rapat gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dipilih dari dan oleh anggota rapat yang hadir.
4. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum dan tata cara pengambilan keputusan yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 3

Anggota Pembina berhenti dari keanggotaan karena :

- a. Mengundurkan diri
- b. Meninggal dunia

Pasal 4
Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengurus

1. Pembina mengangkat pengurus berdasarkan keputusan rapat Pembina dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
2. Rapat Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah berakhir masa jabatan pengurus lama.
3. Susunan Pengurus Yayasan terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara, dan
 - d. Seksi-seksi yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Pasal 5

1. Dalam hal Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
2. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Pengurus dapat dibatalkan.

Pasal 6

Anggota Pengurus berhenti keanggotaannya karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Berakhir masa jabatannya, dan
- d. Diberhentikan oleh Pembina

Pasal 7

1. Anggota Pengurus yang berhenti karena sebagaimana dimaksud pasal (6) huruf b, c dan d maka wajib :
 - a. Membuat laporan tertulis tentang hasil kerja yang menjadi tugasnya sampai dengan diberhentikannya anggota tersebut, dan
 - b. Menyerahkan semua inventaris Yayasan yang dibawa.
2. Apabila anggota yang berhenti sebagaimana yang dimaksud pasal (1) dan masih mempunyai tanggungan terhadap Yayasan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pembina.

Pasal 8

Penggantian anggota Pengurus yang berhenti dilakukan dalam rapat Pembina dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila pengurus yang berhenti memiliki wakil, maka pengganti diambil dari wakilnya.
- b. Apabila pengurus yang berhenti tidak memiliki wakil, maka Pembina menunjuk orang baru.
- c. Apabila pengurus berhenti secara keseluruhan, maka masa kepengurusan dianggap berakhir, dan Pembina menetapkan pengurus baru.

Pasal 9

Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengawas

1. Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang khusus dilakukan untuk itu.
2. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak tanggal pemberhentian Pengawas, Pembina mengisi kekosongan Pengawas.
3. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Pengawas dapat dibatalkan.

BAB III WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ORGAN YAYASAN

Pasal 10 Pembina

Pembina mempunyai kewenangan yang meliputi :

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas.
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar.
- d. Pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan Yayasan, dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan/atau pembubaran Yayasan.

Pasal 11

1. Pembina Yayasan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi terhadap kekayaan Yayasan tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

Pasal 12

Pembina dilarang :

- a. Merangkap jabatan sebagai Pengurus dan/atau Pengawas.
- b. Menjabat pengurus partai politik yang bertentangan dengan azas dan tujuan Yayasan.

Pasal 13 Pengurus

1. Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
2. Pengurus mempunyai kewenangan untuk :
 - a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian maksud dan tujuan Yayasan.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan.
 - c. Mewakili dan bertindak atas nama Yayasan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar pasal 6, Pengurus melakukan koordinasi dengan Pembina untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 15

1. Pengurus dilarang
 - a. Melakukan kegiatan yang secara nyata bisa merugikan Yayasan.
 - b. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.
 - c. Melibatkan Yayasan dengan kegiatan partai politik.
 - d. Menjabat pengurus partai politik yang bertentangan dengan azas dan tujuan Yayasan.
 - e. Melakukan tindakan atas nama Yayasan untuk kepentingan pribadi.
 - f. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang.
 - g. Mengalihkan kekayaan Yayasan, dan
 - h. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan lain.

2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 16

Setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pasal 17

1. Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila :
 - a. Terjadi perkara didepan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan, atau
 - b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.
2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pembina menunjuk wakil Yayasan dalam rapat Pembina.

Pasal 18

1. Apabila Yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengurus, dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian atas kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
2. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 19 Pengawas

Pengawas mempunyai kewenangan untuk :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus dalam melaksanakan tugas kepengurusan Yayasan.
- b. Mengusulkan pemberhentian sementara Pengurus kepada Pembina.

Pasal 20

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

Pasal 21

1. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus.

2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung dilaporkan secara tertulis kepada Pembina dengan menyertakan alasannya.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib :
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan secara permanen.

Pasal 22

1. Apabila Yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas Pengawas dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
2. Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

BAB IV PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 23

Pelaksana kegiatan adalah perseorangan yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dan/atau usaha Yayasan

Pasal 24

1. Yang dapat diangkat menjadi Pelaksana Kegiatan adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Pelaksana Kegiatan diangkat oleh Pengurus atas persetujuan Dewan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Susunan personalia pelaksana kegiatan minimal terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Seorang Wakil Sekretaris, dan
 - e. Seorang Bendahara.

Pasal 25

1. Pelaksana Kegiatan mempunyai kewenangan untuk :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai
 - b. Menyusun program kerja yang berhubungan dengan pencapaian maksud dan tujuan kegiatan yang diamanatkan.
 - c. Melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam program kerja
2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Pelaksana Kegiatan mengusulkan kepada Pengurus untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk surat keputusan.
3. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Pelaksana Kegiatan mengangkat pegawai.

Pasal 26

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal (25), Pelaksana Kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaan.

Pasal 27

1. Pelaksana kegiatan dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang secara nyata bisa merugikan Yayasan.
 - b. Mengadakan perjanjian dengan organisasi lain yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan.
 - c. Melibatkan Yayasan dalam kegiatan partai politik.
 - d. Melakukan tindakan atas nama Yayasan untuk kepentingan pribadi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 28

1. Apabila Yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pelaksana Kegiatan, dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pelaksana Kegiatan secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
2. Anggota Pelaksana Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1).

Pasal 29

Dalam melaksanakan kegiatan selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Pengurus atas persetujuan Pembina, Pelaksana Kegiatan tersebut dapat dihentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 30

Pelaksana Kegiatan berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Berakhir masa jabatan, dan
- d. Dihentikan.

Pasal 31

1. Pelaksana Kegiatan yang dihentikan atau mengundurkan diri, wajib :
 - a. Membuat laporan tertulis tentang hasil kerja yang menjadi tugasnya sampai dengan dihentikan anggota tersebut, dan
 - b. Menyerahkan semua inventaris Yayasan yang dibawa.
2. Apabila anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pasal (1) masih mempunyai tanggung jawab terhadap Yayasan, penyelesaiannya diserahkan kepada Pembina.

Pasal 32

Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan dan kewajibannya.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN, KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 33

1. Kekayaan dan keuangan Yayasan mencakup kekayaan dan keuangan yang dialokasikan untuk organ Yayasan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.
2. Pengurus dan Pengawas bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan dan keuangan Yayasan yang ditugaskan kepada Bendahara Pengurus.
3. Pengurus dan Pengawas menyusun laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan terhitung mulai tahun buku Yayasan ditutup, dan dilaporkan kepada Pembina.
4. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.

- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- c. Melampirkan laporan dari pelaksana kegiatan dan usaha yayasan.

Pasal 34

1. Laporan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
2. Dalam hal terdapat Pengurus dan/atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana ayat (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
3. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Pembina dalam rapat Pembina.

Pasal 35

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 36

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Pembina dan/atau Pengurus sesuai kewenangannya.
2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Rapat Gabungan
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 April 2018

PENGURUS HARIAN
YAYASAN IKHWANUL JANNAH

Ketua,

(Khairuddin. HM)

Sekretaris,

(Imam Pasyah)

Menyetujui
IKHWANUL JANNAH

(Chairulloh)
Ketua Dewan Pembina